

**KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MONITORING DATA
INTERNAL (e-SIMDATIN)
DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

Bagus Eko Prasetyo¹, Marja Sinurat² & Baharudin Tahir³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana Magister Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
Correspondence Author: bagusecho@gmail.com

ABSTRACT

The *e-Simdatin* application is an important instrument in accelerating access to information, simplifying the data collection process, facilitating analysis and decision making related to regional development. This research aims to describe, analyze and determine the performance of the Directorate General of Regional Development in Managing the Internal Data Monitoring Information System (*e-Simdatin*) including supporting and inhibiting factors as well as efforts in implementing activities. The research method used was descriptive qualitative research using 12 informants determined by purposive sampling. The theory used in this research uses the theory of Sinurat and Panjaitan (2017:173) which consists of 5 dimensions. Data collection uses interview, observation, documentation and triangulation techniques. Based on data analysis and discussion according to the dimensions of input, activities, output (output), results (outcome), impact (impact) of 94.14 is good. Factors inhibiting change are indicator targets that are not immediately changed, input at the end of the deadline, low competence, lack of PIC concern, and no satisfaction rating available on the *e-Simdatin* application. Supporting factors are the availability of SOPs, guidebooks, IT equipment, and leadership support. Efforts that should be made include changing targets on time, clarity in inputting output, socializing the use of the *e-Simdatin* application, fostering a sense of empathy for PICs, and adding features related to assessing user satisfaction of the *e-Simdatin* application. The suggestions given are based on data analysis and discussion to conclusions, namely providing research and education, clear and realistic time periods, supervision and monitoring, giving awards and evaluating activities.

Keyword: *Performance Assessment, Information Systems, and Performance Indicators.*

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara, pemerintah dibentuk untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba yang bukan bertujuan untuk mencari keuntungan tapi semata-mata untuk yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antar bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha.

Manajemen kinerja instansi pemerintah di Indonesia lahir dari semangat untuk menciptakan instansi pemerintah yang profesional, berorientasi hasil, dan akuntabel melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen kinerja, anggaran berbasis kinerja, dan ukuran kinerja. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mendorong birokrasi menggunakan anggaran negara secara efektif dan efisien. Secara efektif berarti birokrasi memastikan aktivitas yang dibiayai anggaran negara berdaya guna

dan berdampak pada target-target pembangunan. Secara efisien berarti birokrasi harus memastikan penggunaan anggaran negara secara bijak dan proporsional.

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan hasil kerja/prestasi organisasi dan menunjukkan kinerja organisasi. Hasil kerja organisasi diperoleh dari serangkaian aktivitas yang dijalankan. Aktivitas tersebut dapat berupa pengelolaan sumberdaya organisasi maupun proses pelaksanaan kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk menjamin agar aktivitas tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan upaya manajemen dalam pelaksanaan aktivitasnya. Dengan demikian, hakikat manajemen kinerja adalah bagaimana mengelola seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Nasrullah Nursam, 2017).

Hambatan dalam pengimplementasian sistem informasi manajemen ialah kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan sistem informasi manajemen. Jadi jika seseorang kurang terampil dalam pengolahan sistem informasi manajemen, maka akan sulit bagi orang tersebut untuk mengolah data yang ada. Tantangan sebuah organisasi dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen bisa berupa ketidakmampuan seseorang dalam mengolah data yang mengakibatkan terhambatnya kinerja organisasi. Selain itu tantangan lain dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen ialah kemampuan organisasi mengelola data secara efektif yang dijadikan sebagai sumber yang penting. Jadi dalam mengelola data tidak hanya tergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak komputer saja, tetapi juga tergantung pada kemampuan seseorang dalam pengolahan data (Bani Ilham Alhadi; 2022).

Peningkatan pengguna internet di Indonesia terjadi karena internet mampu memberikan manfaat kepada individu maupun lembaga dalam membantu pekerjaan dan guna menunjukkan eksistensinya dalam menghadapi kompetisi global. Begitu halnya pada pengembangan sistem pemerintahan saat ini, diharapkan untuk mampu memberikan inovasi dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi khususnya internet dalam menunjang kinerja para birokrat pemerintah serta memberikan informasi kepada masyarakat sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat. Inovasi yang dilakukan dapat menghasilkan gagasan baru dengan memadukan teknologi informasi dalam sektor pemerintahan sehingga dapat mengefektifkan pemerintah dalam mengelola unsur di dalamnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Teknologi informasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan tapi bukanlah suatu faktor utama karena terdapat pula faktor sumber daya manusia yang menjadi aktor utama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tanpa adanya peran aktif manusia sebagai anggota dalam suatu organisasi maka tujuan dari organisasi tersebut tidak akan tercapai dengan maksimal. Untuk itu sumber daya manusia mengambil peran yang penting dalam keberhasilan suatu organisasi.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat agar lebih efektif dan efisien kini lebih dikenal dengan sebutan *e-Government*. Perkembangan *e-Government* di Indonesia telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran yang cukup vital dalam penerapan pemerintahan yaitu sebagai usaha untuk membentuk citra pemerintahan yang akuntabel dan transparan dalam berbagai bidang. Perwujudan *e-Government* tentunya berkaitan dengan adanya *good governance* yang di terapkan dalam pemerintahan.

SPBE dikenal dengan istilah *E-government* atau *Electronic Government* kemudian SPBE memberikan informasi dan pelayanan bagi warga-warganya yaitu meliputi *Government to Citizen (G2C)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Government (G2G)*, *Government to Employees (G2E)*, dan *Government to Non-Profit (G2N)*.

Government to Citizen (G2C) adalah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan. *Government to Business (G2B)* adalah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Kemudian sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan tujuannya yakni demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.

Government to Government (G2G) adalah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya dan untuk memperlancar serta mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah yang bersangkutan. *Government to Employees (G2E)* adalah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah.

Government to Non-Profit (G2N) adalah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan Lembaga atau Institusi *Non Profit*, seperti NGO, Partai Politik, dan lain-lain. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi *non profit* dapat di kelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Penilaian Kinerja Sistem Informasi Monitoring Data Internal (e-Simdatin) dapat dilihat melalui pengelolaan data internal dengan dilakukannya pendampingan penguatan kelembagaan Sistem Informasi Manajemen pengelolaan data internal di Ditjen Bina Bangda. Dalam hal ini dilatar belakangi oleh beberapa poin penting diantaranya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri bertugas untuk memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; adanya data tersebar di masing-masing unit kerja dan proses penyampaian data dari unit kerja ke Bagian Perencanaan masih bersifat manual sehingga membutuhkan waktu yang lama; belum tersedianya media informasi terintegrasi yang memungkinkan seluruh unit kerja di Ditjen Bina Bangda untuk berbagi informasi dan *sharing* data, terutama yang terkait dengan capaian kinerja masing-masing unit; adanya kebutuhan data dan informasi kinerja yang mendesak dan terkendala dengan proses analisa yang masih bersifat manual dan membutuhkan waktu yang lama; serta banyaknya data dan informasi internal yang dikelola di bagian sekretariat Ditjen Bina Bangda perlu dibentuk sebuah media informasi yang mampu mengkompilasi data-data tersebut dengan baik, mudah ditemukan, dan bisa diakses seluruh pihak yang berkepentingan.

Penyelenggaraan pemerintahan terkait SPBE tersebut agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, terdapat kegiatan Pendampingan Penguatan Kelembagaan Sistem Informasi Manajemen. Pengelolaan Data Internal Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada komponen input pengelolaan Sistem Informasi Manajemen bertujuan agar terbangun sebuah tata kelola pemerintahan guna mendukung peningkatan kinerja yang maksimal.

Pendampingan Penguatan Kelembagaan tersebut merupakan bagian dari Pemantauan dan Evaluasi SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, disebutkan bahwa Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Sedangkan Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan

klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

Pemerintahan merupakan suatu wadah dimana masyarakat berada di dalamnya harus diberikan pelayanan sebagai warga negara dan rasa aman. Pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana wilayah yang dihuni oleh manusia mengalami kekacauan. Keadaan itu kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok lain. (Menurut Labolo; 2011) dalam perkembangannya, kelompok inilah yang kemudian menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan dan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Kelompok tersebut akhirnya menjadi kelompok minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka lakukan atas nama kelompok mayoritas (rakyat) atau bahkan atas keinginan atau kehendak mereka sendiri.

Kelompok tersebut kemudian menjadi pihak yang mengklaim diri sebagai satu-satunya yang paling berhak memerintah atau “pemerintah”. Pemerintah kemudian diartikan sebagai kelompok orang yang bertanggungjawab atas penggunaan kekuasaan atau *exercising power* (*The International Encyclopedia of Social Science*). Aktivitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal dan eksternal. Pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil mengklaim bahwa secara *eksklusif* berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu. Atas eksklusifisme tersebut sebuah pemerintahan memiliki paling tidak tiga hal pokok, yaitu pertama, memiliki angkatan perang mempertahankan Negeranya dari serangan dan invansi negara lain. Kedua, pemerintahan harus memiliki suatu lembaga yang bertanggung jawab secara legislatif dalam membuat hukum bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan ketiga, pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu negara.

Dikatakan juga bahwa pemerintah adalah sebuah gejala yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan negara. Dalam keseluruhan tersebut pemerintah merupakan satuan yang paling umum untuk melakukan tanggung jawab tertentu guna mempertahankan sistem serta mempertahankan monopoli praktis lewat kekuasaan secara paksa. Cenderung melihat kondisi tersebut sebagai suatu gejala kekuasaan semata, sehingga pemerintah dipandang sah dalam melakukan intervensi secara monopoli sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepentingan umum.

Pemerintahan dapat dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, pemerintahan mencakup semua kekuasaan yang meliputi seluruh fungsi negara. Pemerintahan menunjukkan keseluruhan rangkaian lembaga-lembaga yang dipakai segolongan orang untuk memerintah dan yang menyebabkan orang-orang lainnya tunduk. Jadi pemerintahan dalam arti luas tersebut, merujuk pada ajaran Montesquieu, meliputi keseluruhan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif dan kekuasaan Yudikatif. Ketiga lembaga tersebut merupakan unsur-unsur kekuasaan negara.

Secara umum Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Menurut (Rauf dan Munaf 2015), Pemerintahan merupakan sebuah organisasi yang memiliki: (1) otoritas yang memerintah dari suatu unit politik, (2) kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*Political*), (3) aparatus yang merupakan badan Pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan, (4) kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Menurut (Syafie Inu Kencana; 2002: 138) mengatakan bahwa: Pemerintahan secara etimologi, kata Pemerintahan berasal dari kata “Pemerintahan” yang berarti badan atau organ elit yang

melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Kemudian mendapat akhiran “an” menjadi kata “Pemerintahan” yang berarti perihal, cara, pembuatan atau urusan dari badan-badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan pengetahuan, sedangkan Pemerintahan berarti perihal, cara, pembuatan atau urusan dari badan-badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Jika digabungkan menjadi Ilmu Pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dalam suatu organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat serta melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi Pemerintahan meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara.

Pengembangan sistem elektronik Pemerintahan atau *e-Government* merupakan salah satu dari 9 (sembilan) program Percepatan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Dimana salah satu produk dari kebijakan pengembangan *e-Government* adalah Penilaian Kinerja Sistem Online. Indrajit Richardus Eko (2005) berpendapat bahwa: Secara umum, istilah yang berawalan “e” biasanya memiliki nuansa penggunaan teknologi internet sebagai sarana utama yang menggantikan media konvensional. Mengingat bahwa esensi tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media teknologi, terutama internet, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media teknologi, terutama internet, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai “customer”-nya.

METODE PENELITIAN

Penelitian berangkat dari sebuah keingintahuan seseorang untuk mendalami segala sesuatu memulai proses perancangan, penyelidikan dan penyimpulan untuk menemukan sebuah kebenaran. Menurut (Suryabrata; 2016) bahwa “Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.

Penelitian merupakan proses untuk mendapat sebuah kebenaran dan memecahkan suatu masalah yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan dengan berlandaskan pada teori dan peraturan-peraturan yang relevan terhadap masalah tersebut. Landasan tersebut nantinya akan menjadi bahan perbandingan antara fenomena yang ada di lapangan dengan isi dari teori dan peraturan selaku landasan dalam melakukan penelitian. Menurut (Woody dalam Neuma; 2006) penelitian adalah: *A method to find the truth which is also a critical thinking (critical thinking). Research includes providing a definition and redefinition of the problem, formulate hypotheses or answer while, Make conclusions and at least conduct careful testing on all the conclusions to determine whether it fits with the hypothesis.*

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran yang merupakan pemikiran kritis (*critical thinking*). Penelitian memberikan definisi dan redefinisi permasalahan, merumuskan hipotesis atau menjawab sementara, membuat kesimpulan dan melakukan pengujian secara cermat terhadap seluruh kesimpulan. Berdasarkan penjelasan (Simangunsong; 2017) dalam bukunya, “penelitian termasuk dalam *perspektif knowledge management* dimana penelitian diibaratkan menulis karya ilmiah, semi ilmiah, bahkan yang non-ilmiah sekalipun adalah sebuah aktivitas intelektual yang sangat penting dan terus-menerus berproses”.

Singkatnya, agar suatu penelitian dapat mencapai hasil yang benar, tepat sasaran dan maksimal, maka harus mempunyai rancangan penelitian yang sesuai dengan situasi dan kondisi, serta sesuai dengan objek yang diteliti yaitu Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring Data Internal. (Simangunsong; 2017), menyatakan

“rancangan atau desain penelitian dalam arti sempit dimaknai sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis penelitian, sedangkan dalam arti luas rancangan atau desain penelitian meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian.”

Proses penelitian ini kemudian didesain sedemikian rupa oleh peneliti agar penelitian dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang menjadi harapan peneliti. Desain penelitian menjadi salah satu unsur penting untuk memberikan arahan dan pedoman dalam melakukan penelitian nantinya. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam pengertian yang lebih sempit desain penelitian hanya mengenai pengumpulan data dan analisis data. Kemudian (Berg; 2001) mengungkapkan desain penelitian adalah; *The designstage of research is concerned with a series of important decisions having to do with the research idea or question(s). What types of information or data will be gathered and through what forms of data-collection technologies. Where will the research be undertaken, and among what group or groups of people (questions of site, setting, and sample). In doing research, you must decide whether to use one data-collection strategy alone or to combine several strategies (data triangulation).*

PEMBAHASAN

Aplikasi e-Simdatin merupakan aplikasi yang berguna untuk melihat kinerja pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah berdasarkan penggunaan realisasi anggaran satu tahun kegiatan pada dokumen DIPA. Sebelum melakukan pengisian target kegiatan pada aplikasi tersebut, telah dilakukan pembobotan atau rencana kegiatan dalam bentuk Prognosis dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan mengharuskan untuk membuat RPD (Rencana Penarikan Dana) dalam satu tahun kegiatan kemudian setiap bulan dilakukan penilaian realisasi tersebut untuk melihat seberapa besar realisasi keuangan yang telah dicapai. Kemudian dalam realisasi keuangan tersebut harus terdapat kejelasan *output* yang dihasilkan, dalam penilaian *output* tersebut harus ada data dukung yang berupa *evidence* yang kemudian di upload ke dalam aplikasi e-Simdatin untuk dasar penilaian sebagai bentuk pengukuran kinerja dari hasil target yang telah dilakukan.

Input

Anggaran Pengelolaan e-Simdatin

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Kepala Bagian Keuangan, yang menjelaskan terkait pagu anggaran untuk pengelolaan e-Simdatin Ditjen Bina Bangda yakni: “Anggaran untuk pengelolaan e-Simdatin Ditjen Bina Bangda sebesar Rp. 77.000.000 diperuntukkan untuk penambahan *server*, pengamanan jaringan, perawatan aplikasi, penyewaan laptop/komputer serta pengadaan *create SSL (Secure Sockets Layer)* pada domain website.”

Berdasarkan hasil observasi dan analisis, bahwa kaitannya dengan teori yang digunakan masuk pada dimensi input yaitu kaitannya dengan anggaran pengelolaan aplikasi e-Simdatin kemudian pengamanan jaringan, perawatan aplikasi, penyewaan laptop/komputer serta pengadaan *create SSL (Secure Sockets Layer)* pada domain website dari wawancara tersebut dapat ditarik bahwa kaitannya masuk pada dimensi input kemudian dari proses tersebut akan mendukung teori pada dimensi kegiatan, keluaran, hasil hingga dampak yang akan dirasakan oleh lembaga ini. Kemudian server yang digunakan untuk aplikasi e-Simdatin adalah server lama dari aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang diintegrasikan ke dalam SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Dari server tersebut, telah digunakan untuk aplikasi e-Simdatin untuk internal Ditjen Bina Bangda dan pembuatan aplikasi *cloud* Bangda yang digunakan sebagai penyimpanan data internal. Aplikasi e-Simdatin merupakan aplikasi internal yang digunakan pada lingkup Ditjen Bina Bangda. Sehingga tidak memerlukan server yang

besar, berbeda dengan aplikasi yang digunakan untuk layanan pemerintah daerah yang membutuhkan server besar.

Pada pelaksanaannya, peneliti bertemu dan mendapatkan informasi dari 10 (sepuluh) orang informan sesuai dengan yang terdapat dalam pedoman wawancara yang telah disusun dan direncanakan, yang selanjutnya dijadikan sebagai data primer dalam menganalisis Kinerja Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam Pengelolaan e-Simdatin. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Keuangan, yang menjelaskan terkait data Indikator Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yakni: “Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023, nilai akhir Revisi DIPA yakni 10.00 dan nilai akhir Deviasi Halaman III DIPA sebesar 6.22. Besaran penyerapan anggaran sebesar 18.91 sedangkan belanja kontraktual nilai akhirnya sebesar 9.45. Besaran nilai akhir pengelolaan UP dan TUP sebesar 9.66 dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran capaian *output* sebesar 25.00. Sehingga hasil dari beberapa penjabaran tersebut, dapat dilihat nilai total atau nilai akhir sebesar 94.11.”

Berdasarkan hasil observasi dan analisis, bahwa kaitannya dengan teori yang digunakan masuk pada dimensi output kemudian karena merujuk pada proses dari dimensi kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dari dimensi tersebut akan mendukung dimensi outcome sehingga kaitannya dengan teori yang digunakan masih sejalan karena mendukung dimensi input, kemudian bahwa nilai kinerja Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah baik sesuai nilai IKPA dari Kementerian Keuangan, sehubungan dengan hal tersebut aplikasi e-Simdatin yang ada di Ditjen Bina Pembangunan Daerah sangat membantu dalam penilaian internal terkait perencanaan kegiatan yang telah terintegrasi pada sistem aplikasi Krisna Bappenas dan aplikasi Sakti Kementerian Keuangan telah membuat organisasi berjalan dengan sebagaimana mestinya, walaupun masih banyak kekurangan yang terjadi dilapangan karena target indikator kegiatan yang masih tidak sesuai dengan tujuan kegiatan dalam mendukung tujuan organisasi.

Ketersediaan Server dan Perangkat IT

Hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Bagian Umum yang menjelaskan terkait ketersediaan server dan perangkat IT dalam penggunaan e-Simdatin Ditjen Bina Bangda yakni: “Ketersediaan server dan perangkat IT pada Ditjen Bina Bangda terdapat dua yaitu lokasinya berada di lantai 1 dan lantai 3 kemudian ketersediaan perangkat IT meliputi Komputer dan Laptop di masing-masing ruangan server sebagai pengendali pada aplikasi yang ada pada Ditjen Bina Bangda, didalam server terdapat AC sentral sebagai pendingin untuk menjaga kelembaban pada ruangan server yang tidak boleh panas, apabila terjadi mati lampu telah tersedia mirror untuk aplikasi sebagai penyimpanan data sementara. Setiap programmer diberikan 1 buah laptop dengan kapasitas ROG (*Republic of Gamers*) dengan penyimpanan SSD (*Solid State Drive*).”

Berdasarkan hasil observasi dan analisis dapat diidentifikasi dan dikategorikan dalam dimensi input dalam kerangka teori analisis input, kegiatan, output, outcome, dan impact alasannya yaitu masuk dimensi Input karena merujuk pada semua sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan suatu program atau kegiatan dalam wawancara tersebut beberapa elemen yang disebutkan adalah ketersediaan server dan perangkat IT Server dan perangkat IT komputer dan laptop yang ada di Ditjen Bina Pembangunan Daerah, kemudian lokasi server terletak di lantai 1 dan lantai 3 sehingga perangkat IT spesifik yang setiap programmer diberikan laptop dengan spesifikasi tertentu ROG dengan SSD, kemudian AC sentral Pendingin untuk menjaga kelembaban di ruangan server, kemudian pada mirror untuk aplikasi penyimpanan data sementara jika terjadi mati lampu semua elemen ini adalah sumber daya yang dimasukkan ke dalam sistem untuk mendukung operasional pada Ditjen Bina Bangda, alasan

kategorisasi ketersediaan server dan perangkat IT adalah input fisik yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan program di Ditjen Bina Bangda. Lokasi server dan spesifikasi perangkat IT adalah informasi mengenai input tersebut yang mempengaruhi efisiensi dan keandalan operasional, AC sentral dan mirror aplikasi adalah bagian dari input dalam bentuk infrastruktur dan dukungan teknis yang memastikan operasional server tetap optimal. Dalam konteks wawancara ini semua informasi yang disampaikan berhubungan dengan input karena menggambarkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia untuk mendukung kegiatan Ditjen Bina Bangda ini belum sampai pada tahap kegiatan aktivitas spesifik yang dilakukan, keluaran hasil langsung dari kegiatan, hasil perubahan yang terjadi akibat keluaran, atau dampak efek jangka panjang dari hasil.

Hasil wawancara Peneliti dengan Perencana Ahli Muda Sub Substansi Penyusunan Program dan Anggaran yang menjelaskan terkait ketersediaan server dan perangkat IT dalam penggunaan e-Simdatin Ditjen Bina Bangda yakni: "Dalam pengadaan server, terdapat kendala berupa pengelolaan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang harus berpusat di Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri. Terkait hal tersebut mengakibatkan pengadaan server sulit dilakukan. Oleh karena itu, Ditjen Bina Bangda menggunakan server dari aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang diintegrasikan ke aplikasi SIPD RI milik Pusdatin, karena server dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah tidak digunakan lagi sehingga sekarang digunakan untuk server aplikasi e-Simdatin sebagai aplikasi internal Ditjen Bina Bangda yang tidak memerlukan kapasitas yang banyak."

Berdasarkan hasil observasi dan analisis, mengungkapkan berbagai aspek yang dapat dikategorikan dalam dimensi kegiatan, keluaran output, dan outcome, analisisnya yaitu pada dimensi kegiatan merujuk pada aktivitas atau proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu sehingga dalam wawancara ini kegiatan yang diidentifikasi yaitu pengelolaan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) aktivitas ini mengharuskan pusat data dan sistem informasi dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kemendagri, penggunaan server dari aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Ini adalah kegiatan yang dilakukan sebagai solusi untuk kendala dalam pengadaan server. Penjelasan terkait dimensi Output merujuk pada hasil langsung dari kegiatan yang dilakukan dalam wawancara ini keluaran yang diidentifikasi yaitu server dari aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang tidak digunakan lagi Ini adalah keluaran langsung dari kegiatan pengelolaan dan integrasi server, kemudian server yang digunakan untuk aplikasi e-Simdatin yaitu keluaran ini adalah hasil dari pemanfaatan server yang sudah ada untuk aplikasi internal Ditjen Bina Bangda. Pasa dimensi outcome merujuk pada perubahan atau manfaat yang terjadi akibat dari keluaran yang dihasilkan dalam wawancara ini hasil yang diidentifikasi yaitu berupa kemudahan dan efisiensi dalam pengelolaan aplikasi internal Ditjen Bina Bangda dengan menggunakan server yang sudah ada sehingga Ditjen Bina Bangda dapat mengelola aplikasi e-Simdatin dengan lebih efisien tanpa memerlukan kapasitas yang banyak. Kesimpulan berdasarkan wawancara tersebut dimensi yang dapat diidentifikasi yaitu dimensi kegiatan berupa pengelolaan SPBE yang terpusat di Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri serta penggunaan server dari aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Dimensi output yaitu server dari aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang digunakan untuk aplikasi e-Simdatin. Dimensi outcome yaitu Kemudahan dan efisiensi dalam pengelolaan aplikasi internal Ditjen Bina Bangda.

Hasil wawancara Peneliti dengan Direktur PT. Quanta Tunas Abadi yang menjelaskan terkait ketersediaan server dan perangkat IT dalam penggunaan e-Simdatin Ditjen Bina Bangda yakni: "Ditjen Bina Bangda melakukan Kerjasama kontrak dengan PT. Quanta Tunas Abadi dalam penggunaan internet. Kelebihan yang dimiliki yaitu akurasi perhitungan yang sangat baik, sehingga

seluruh Internet Service Provider (ISP), Network Access Point (NAP) provider, dan Corporate Users menggunakan Multi Router Traffic Grapher (MRTG) karena traffic MRTG dapat menyimpan data secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan kemudian mengingat ukuran file dapat menjadi sangat besar jika pencatatannya dilakukan setiap detik, maka pada umumnya MRTG menghitung rata-rata penggunaan setiap lima menit, sangat pas digunakan untuk Instansi besar sekelas Kementerian ini.”

Berdasarkan hasil observasi dan analisis wawancara tersebut mengungkapkan beberapa aspek yang dapat dikategorikan dalam dimensi kegiatan, *output*, *outcome*, dan *impact* berikut kemudian analisisnya terkait dimensi kegiatan merujuk pada aktivitas atau proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam wawancara ini kegiatan yang diidentifikasi yaitu kerjasama kontrak dengan PT. Quanta Tunas Abadi dalam penggunaan internet yaitu kegiatan yang dilakukan Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk mendapatkan layanan internet kemudian penggunaan *Multi Router Traffic Grapher* (MRTG) yaitu aktivitas ini dilakukan untuk memonitor dan mengelola penggunaan internet. Dimensi *Output* merujuk pada hasil langsung dari kegiatan yang dilakukan dalam wawancara ini keluaran yang diidentifikasi yaitu data traffic internet yang tersimpan secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan Ini adalah hasil langsung dari penggunaan MRTG. Dimensi *Outcome* merujuk pada perubahan atau manfaat yang terjadi akibat dari keluaran yang dihasilkan dalam wawancara ini hasil yang diidentifikasinya yaitu akurasi perhitungan penggunaan internet akurasi ini memudahkan pengelolaan dan pemantauan penggunaan internet oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah kemudian efisiensi dalam pengelolaan lalu lintas internet dengan data yang terperinci dan akurat pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah dapat mengelola lalu lintas internet dengan lebih efektif. Dimensi *Impact* merujuk pada efek jangka panjang atau perubahan signifikan yang terjadi akibat dari hasil yang dicapai. Dalam wawancara ini, dampak yang diidentifikasi yaitu peningkatan kinerja Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan akurasi dan efisiensi pengelolaan internet, ada peningkatan dalam operasional dan kinerja keseluruhan instansi. Oleh karena itu, dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Terkait pengadaan dan pengelolaan server anggarannya sangat rendah. Dari Rupiah Murni (RM) sangat sulit untuk melakukan penambahan pengadaan dan pengelolaan server. Hal tersebut terkendala lantaran adanya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam rangka peningkatan pelayanan dukungan manajerial, Sekretariat mempunyai tugas pelayanan terhadap Direktorat selaku pelaksana kegiatan teknis. Sehubungan dengan hal tersebut, terkait ketersediaan server dan perangkat IT jika pengadaan server menggunakan anggaran dari Rupiah Murni lumayan sulit, oleh karena itu Ditjen Bina Bangda dalam pelaksanaan pendukung kegiatan yang tidak di biayai oleh APBN meminta dukungan dari kerjasama Hibah Luar Negeri yang dilakukan untuk pengadaan server dan perangkat IT tersebut.

Lama Penginputan Hasil Capaian Kinerja pada Setiap Unit Kerja Eselon III

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Perencana Ahli Muda pada Sub Substansi Program dan Anggaran yang menjelaskan terkait lama penginputan hasil capaian kinerja pada setiap Unit Kerja Eselon III di Ditjen Bina Bangda yakni: “Pada setiap triwulan dilakukan evaluasi realisasi anggaran dan kinerja waktu penginputan diberikan deadline 2-3 minggu sebelum di tutupnya aplikasi pada saat akan dilakukan evaluasi triwulanan. Lamanya penginputan tersebut yang memakan waktu cenderung lama sehingga proses penginputan pun menjadi terganggu.”

Berdasarkan hasil observasi dan analisis dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan beberapa aspek yang dapat dikategorikan dalam dimensi kegiatan, dimensi *output*, dan dimensi *outcome* kemudian analisis dari dimensi pertama yaitu dimensi kegiatan yang merujuk pada aktivitas atau proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam wawancara ini kegiatan yang diidentifikasi yaitu

evaluasi realisasi anggaran dan kinerja setiap triwulan ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk menilai kemajuan dan pencapaian dalam penginputan data sebelum *deadline* 2-3 minggu dalam aktivitas ini dilakukan sebagai persiapan sebelum evaluasi triwulanan. Dalam dimensi kedua yaitu dimensi *Output* merujuk pada hasil langsung dari kegiatan yang dilakukan dalam wawancara ini dalam keluaran yang diidentifikasi yaitu data anggaran dan kinerja yang diinputkan sebelum *deadline* Ini merupakan hasil langsung dari proses penginputan data. Dimensi ketiga yaitu dimensi *outcome* merujuk pada perubahan atau manfaat yang terjadi akibat dari keluaran yang dihasilkan. Dalam wawancara ini hasil yang diidentifikasi yaitu Laporan evaluasi triwulanan dalam laporan ini dibuat berdasarkan data yang telah diinputkan dan digunakan untuk menilai realisasi anggaran dan kinerja. Dimensi keempat yaitu dimensi *Impact* merujuk pada efek jangka panjang atau perubahan signifikan yang terjadi akibat dari hasil yang dicapai dalam wawancara ini dampak yang diidentifikasi yaitu kemungkinan terganggunya proses evaluasi karena lamanya waktu penginputan yang memakan waktu dampaknya adalah proses evaluasi triwulanan bisa terganggu atau tidak optimal.

Kemudian, hasil wawancara Peneliti dengan Pranata Komputer Ahli Pertama yang menjelaskan terkait lama penginputan hasil capaian kinerja pada setiap Unit Kerja Eselon III di Ditjen Bina Bangda yakni: "Pada aplikasi e-Simdatin terdapat fitur dashboard dan capaian hasil penginputan. Aplikasi ini untuk instansi di level Pemerintahan masih sangat rendah karena pengalaman sebelum kerja di Intansi Pemerintahan lama kerja di swasta di bidang pembuatan aplikasi selama lima tahun, jadi untuk aplikasi ini masih sangat banyak kekurangan karena gampang dibobol karena sistem keamanan yang rendah dan server yang minim membuat aplikasi e-Simdatin gampang down saat banyak yang akses."

Berdasarkan hasil observasi dan analisis dari teori yang digunakan pada lima dimensi masuk semua yaitu dimensi input, kegiatan, *output*, *outcome*, dan *impact* dapat diidentifikasi yaitu pada dimensi pertama dimensi input merujuk pada semua sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan suatu program atau kegiatan. Dalam wawancara ini, input yang diidentifikasi yaitu fitur dashboard dan capaian hasil penginputan ini merupakan komponen perangkat lunak dari aplikasi e-Simdatin, pengalaman kerja di sektor swasta selama lima tahun ini adalah latar belakang keahlian yang dibawa ke pengembangan aplikasi e-Simdatin, sistem keamanan dan server meskipun disebutkan sebagai kurang memadai, mereka tetap menjadi bagian dari input yang tersedia untuk aplikasi. Dimensi kedua dimensi kegiatan merujuk pada aktivitas atau proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu Dalam wawancara ini, kegiatan yang diidentifikasi yaitu pengembangan dan pemeliharaan aplikasi e-Simdatin aktivitas yang dilakukan oleh tim pengembangan berdasarkan pengalaman sebelumnya di sektor swasta, implementasi fitur dashboard dan capaian hasil penginputan proses teknis yang terlibat dalam menambahkan fitur ini ke dalam aplikasi. Dimensi ketiga dimensi *Output* merujuk pada hasil langsung dari kegiatan yang dilakukan dalam wawancara ini keluaran yang diidentifikasi yaitu aplikasi e-Simdatin dengan fitur dashboard dan capaian hasil penginputan ini adalah hasil langsung dari kegiatan pengembangan dan implementasi fitur. Dimensi keempat dimensi *outcome* merujuk pada perubahan atau manfaat yang terjadi akibat dari keluaran yang dihasilkan dalam wawancara ini hasil yang diidentifikasi yaitu berupa penggunaan aplikasi e-Simdatin oleh instansi Pemerintahan walaupun tingkat penggunaannya masih rendah aplikasi ini mulai digunakan di instansi pemerintah. Dimensi kelima dimensi *impact* merujuk pada efek jangka panjang atau perubahan signifikan yang terjadi akibat dari hasil yang dicapai dalam wawancara ini dampak yang diidentifikasi yaitu keandalan dan keamanan aplikasi yang rendah karena sistem keamanan yang lemah dan server yang minim aplikasi e-Simdatin mudah dibobol dan sering down saat banyak yang mengaksesnya yang mengurangi kepercayaan dan efektivitas penggunaan dalam jangka panjang. Kemudian berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan informan, peneliti menarik kesimpulan bahwa ketika adanya perubahan target indikator saat

pelaksanaan revisi DIPA, Sub Direktorat tidak langsung mengubah target-target pada indikator tersebut yang mengakibatkan saat penginputan hasil realisasi kegiatan dan data dukung sebagai dasar penilaian output pada kegiatan untuk menghitung kinerja tidak sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Kemudian, setelah melihat di lapangan, peneliti menganalisis bahwa terdapat beberapa faktor penghambat lainnya dalam penilaian kinerja e-Simdatin diantara terjadinya perubahan target indikator yang tidak segera dilakukan input perubahan, kecenderungan penginputan aplikasi e-Simdatin diakhir mendekati waktu *deadline*, rendahnya kompetensi *Person In Charge* (PIC) dalam penginputan aplikasi e-Simdatin, belum adanya kepedulian dari PIC saat pengisian pada aplikasi e-Simdatin, sehingga harus diingatkan setiap bulanya diakhir waktu *deadline*, belum adanya rating penilaian kepuasan pengguna aplikasi e-Simdatin.

PENUTUP

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Kinerja Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam pengelolaan e-Simdatin berdasarkan yang ditunjukkan dengan Catatan Hasil Reviu (CHR) Laporan Kinerja E-1 Inspektorat Jenderal Kemendagri dan hasil nilai IKPA oleh Kemenkeu, melalui input, kegiatan, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) sebesar 94,11 sudah baik, tercapainya target yang telah ditentukan dan meningkatnya realisasi anggaran dan kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- AA. Anwar Prabu Mangkunegara. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Amstrong dan Baron dalam Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*, Jakarta.
- Armawi, Armaidly dan Ichlasul Amal. 1999. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Auerbach, Carl F. & Silverstein, Louise B. 2003. *Introduction to Coding and Analysis Qualitative Data*. New York : New York University Press.
- Berg, Bruce L. 2001. *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*. Needham.
- Bloor, M. and Wood, F. 2006. *Keywords in Qualitative Methods*, London: Sage Publications.
- Cardoso, Faustino. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta.
- Creswell, JS. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design; Choosing Among Five Approaches, Third Edition*. California: Sage Publication, Inc.
- Darmawan, Deni., & Kunkun Nur Fauzi. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dessler. Gary. 2015. *Human Resources Management (Manajemen Sumber Daya Manusia)*, Edisi Empat Belas Bahasa Indonesia. Jakarta: Indeks.
- Finer, S.E. 1974. *Comparative Government*. Harmondsworth.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. 2017. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. (Terjemahan) Edisi Delapan*, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hansen & Mowen. 2004. *Manajemen Biaya, Edisi Bahasa Indonesia*. Buku Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Hersey, Paul dan Kenneth H. Blanchard. 1982. *Management of Organizational Behavior*. America: Prentice-Hall, Inc.
- Irianto, J. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Surabaya: Insan Cendekia.

- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan Pengembangannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 25.
- Laudon, Kenneth C dan Jane P.Laudon. 2010. *Sistem Informasi Manajemen (Edisi 10)*. Diterjemahkan Oleh Criswan Sungkono. Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mangkuprawira, S. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mathis, R.L. & Jackson, J.H. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mathis, R.L. - John H. Jackson. 2006. *Human Resource Management*, Jakarta : Salemba Empat.
- Mondy, Noe. 2008. *Human Resource Management*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mulyadi. 2005. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan TujuhPublishing. Hal. 63.
- Mutia, Nila. 2009. *Tesis: Usulan Rancangan Indikator Pengukuran Kinerja Service Scorecard Untuk Kualitas Jasa Pada Diklat Pelayaran*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Neuman. W. L. 2006. *Sosial research method: qualitative and quantitative approaches (Third Edition)*, USA.
- Poerwadarmita. W.Y.S. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahyunir Rauf & Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*, Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Raymond Mcleod, Jr. 1995. *Sistem Informasi Manajemen jilid Dua*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Sani, Achmad dan Masyhuri, M. 2010. *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Sastrohadiwiryono, Siswanto. 2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan Operasional*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Setyosari, Punaji. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Schuler, R.S., dan Jackson, S.E. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Setyosari Punaji. 2010. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana. Hal. 89.
- Simangunsong, Fernandes (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta, Bandung.
- Simangunsong, Fernandes. (2021). *Menata Ulang Organisasi Perangkat Daerah*. Bandung. Alfabeta.
- Sinurat, Marja dan Maurits, Horas. 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Bandung: Pustaka Rahmat, hal. 173.
- Stair, R. M., & G. W. Reynolds. 2010. *Principles of Information Systems, a managerial Approach*. USA: Course Technology.
- Sutedjo, M.M. 2002. *Pupuk dan Cara Pemupukan*. Penerbit Rhineka Cipta. Jakarta. Hal. 177.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. Alfabeta. Bandung.
- Syafri, Wirman and Alwi, Alwi. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik*. Bandung.
- Syafie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Renika Cipta.
- Vanany, Iwan. *Aplikasi Analytic Network Process (ANP) Pada Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja (Studi Kasus pada PT.X)*. Jurnal Teknik Industri Vol.5.